



RANCANGAN AKHIR RENJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025



Berdasarkan Peraturan wali Kota
Samarinda
Nomor : 33 Tahun 2024
Tanggal : 5 Agustus 2024



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.9-05/092/HK-KS/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ayat (2) pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2025 dengan komposisi personalia termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum bertugas menyusun Rencana Kerja Tahun 2025
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2025 (terlampir)
- KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum Kesatu meliputi:
- a. Berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran yang paham akan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - b. Harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Perwakilan dari setiap bidang yang ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda dan diketuai oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat Daerah;
- KELIMA : Komposisi dan susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan terdiri atas:
- Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
- Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda / pejabat lainnya
- Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala Badan dengan anggota pejabat/staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggungjawab kepada Wali Kota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.

- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024, bagi anggota tim sebagaimana dimaksud tidak diberikan honorarium .
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Maret 2024



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektorat Kota Samarinda
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kota Samarinda
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR: 000.9-05/092/HK-KS/III/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025.

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
 Samarinda Tahun 2025

No	Nama/Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Ketua
2	Hj.Susy Sukmawati, ST, MT Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Sekretaris
3	Nadya Turisna, S.STP, M.Si Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
4	Imam Gunadi, S.STP Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
5	Wahyuni Nadjar, ST, MT Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
6	Syamsu Nur, S.E, M.M Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
7	Zulkifli, S.Kom Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Anggota

		Pengembangan Kota Samarinda	
8	Siti Nurhasanah, S.Si, M.Si. Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
9	Achmad Hendi Dwi Satrya, SE Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
10	Onny Fahrorny, S.E., M.Si. Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
11	Hendra Wijaya, S.E. Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
12	Budi Priyosutejo, S.E. Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
13	Heldiana, S.Sos. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
14	Dewi Rahmadani, S.E. Analisis Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
15	Ela Nurhayati Staf	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
16	Mochammad Taufiq Budiman, SH Staf	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota

17	Hj. Erma Suryani, SE Staf	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
18	Sari Astrini, S.Pd Staf	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Balaikota, Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kode Pos 75242
Kalimantan Timur

Yth

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
4. Camat Se-Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/1788/300.01

Tentang

**Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Rankhir Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2025**

Dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Untuk itu diminta perhatian saudara tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memperhatikan dan mendukung prioritas pembangunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan, hasil aspirasi masyarakat yang tercantum dalam hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD;
2. Tata cara penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
3. Koordinasi mengenai penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui BAPPERIDA Kota Samarinda;
4. Penyampaian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 paling lambat pada tanggal 22 Juli 2024 kepada Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda untuk di verifikasi.

Demikian untuk mendapat perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2024



Plh. Sekretaris Daerah,

Desy Damayanti

Lampiran 1

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1788/300.01

Tentang : Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Rankhir Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2025

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
9. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
13. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
14. Dinas Perikanan Kota Samarinda
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
16. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
20. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
21. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
22. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
26. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
29. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
30. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
31. Kecamatan Palaran
32. Kecamatan Samarinda Ilir
33. Kecamatan Samarinda Seberang
34. Kecamatan Samarinda Utara
35. Kecamatan Samarinda Ulu
36. Kecamatan Sungai Kunjang
37. Kecamatan Sambutan
38. Kecamatan Sungai Pinang
39. Kecamatan Samarinda Kota
40. Kecamatan Loa Janan Ilir

Lampiran 2

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1788/300.01

Tentang : Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Rankhir Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2025

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB		PENJELASAN BAB
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam proses penyusunan RAPBD
1.2	Landasan Hukum	Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD
1.3	Maksud dan Tujuan	Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4	Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB	PENJELASAN BAB
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada halaman 403 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK format Tabel T-C.30 Halaman 404 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

	BAB	PENJELASAN BAB
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB	PENJELASAN BAB
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda 4. Lampirkan tabel T-C.31 Halaman 405 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB		PENJELASAN BAB
		Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32 Halaman 406 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

	BAB	PENJELASAN BAB
3.3	Program dan Kegiatan	Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: ▪ Pencapaian visi dan misi kepala daerah, ▪ Pencapaian SDGs, ▪ Pengentasan kemiskinan, ▪ Pencapaian NSPK dan SPM, ▪ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, ▪ Pengembangan daerah terisolir, ▪ Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan. ▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). ▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 Halaman 408 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB	PENJELASAN BAB
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	BAB ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang sudah diinputkan dalam SIPD-RI
BAB IV PENUTUP	Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
- e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
 - Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

BAB IV
PERUBAHAN
Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

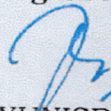
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 500

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Untuk itu dalam Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 sudah menyesuaikan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis yang meliputi :

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dalam Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan, sub kegiatan dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2025 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 5 Agustus 2024

Kepala BAPPERIDA
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

	DAFTAR ISI	HALAMAN
Kata Pengantar.....		II
Daftar Isi.....		IV
Daftar Tabel.....		VI
 BAB I	 PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	7
1.2	Landasan Hukum.....	9
1.3	Maksud dan Tujuan.....	13
1.4	Sistematika Penulisa.....	14
 BAB II	 HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA TAHUN 2024	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bapperida.....	18
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Kota Samarinda.....	31
2.2.1	Tugas Pokok dan Fungsi.....	32
2.2.2	Kajian Atas Indikator Kinerja.....	34
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPERIDA Kota Samarinda.....	35
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5	Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat.....	55
 BAB III	 TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	56
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BAPPERIDA Kota Samarinda.....	59
3.3	Program dan Kegiatan.....	67
3.3.1	Faktor factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan program dan kegiatan.....	67
3.3.2	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan.....	69

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA	
	4.1 Program dan Kegiatan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024...	84
BAB V	PENUTUP.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Bapperida Kota Samarinda Pencapaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	19
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.....	31
Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota Samarinda	40
Tabel 3.1 : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Matrik Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2022-2026.....	67
Tabel 3.2 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 BAPPERIDA Kota Samarinda.....	70
Tabel 4.1 : Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BAPPERIDA Kota Samarinda	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda (BAPPERIDA Kota Samarinda) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Samarinda mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja BAPPERIDA 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Matrik Rencana Strategis BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.

3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Rancangan Akhir Renja BAPPERIDA dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub program BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Provinsi/Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85)
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Matrik Rencana Strategis BAPPERIDA Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis RKPD Kota Samarinda pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA Kota Samarinda pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA Kota Samarinda tahun 2025 yang mengacu pada Matrik Renstra dan RKPD.
3. Mengevaluasi Renja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun sebelumnya.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota Samarinda tahun sebelumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2022 dan Capaian Renstra BAPPERIDA, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPERIDA

Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPERIDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Matrik Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPERIDA, berisikan uraian mengenai :
 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan;
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai: (1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; (3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BAPPERIDA maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yaitu Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPERIDA

Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kota Samarinda selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDALITBANG tahun 2023 dan capaian RENSTRA BAPPEDALITBANG sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Samarinda

Perangkat Daerah : BAPPERIDA Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra s/d Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023		Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	11 (8+10)	12=(11/5*100)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan								
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	6	2	3	3	100	5	83,33
5.01.02.2.01.02	Kordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telehan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	1	2	2	100	4	66,67
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6	2	3	3	100	4	66,67
5.01.02.2.01.04	Kordinasi Pelaksanaan Forum KPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	1	2	2	100	3	50,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	2	2	2	100	4	66,67
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	60.000	1	20.000	20.000	100	40.000	66,67
5.01.02.2.01.07	Kordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	6	3	2	2	100	4	66,67

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/Keg RENJA PDThn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra target PDs/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 (8+10)	12=(11/5*100)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi									
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	1	1	3	100	1	2	66,67
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	200	1	40	40	100	80	120	60,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi									
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	4	4	4	100	4	8	66,67
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kerjasama	3	1	1	14	100	1	2	66,67
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	1	4	4	100	4	8	66,67
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen								
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	5	1	3	3	100	1	4	80,00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	60	-	20	20	100	20	40	66,67
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	10	-	4	4	100	4	8	80,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	27	-	9	9	100	9	18	66,67
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	-	1	1	100	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/Keg RENJA PDThn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.03	PROGRAM SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI DAN PERENCANAAN									
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA(Sumber Daya Alam)									
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Laporan	9	-	-	-	-	3	3	33,33
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Laporan	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perencanaan	Laporan	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	12	-	-	-	-	4	4	33,33
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	-	1	1	100	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2023			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100)
5.01.01	PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KOTA PENUNJANG AN DAERAH	IKM	Nilai								
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai								
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	18	5	5	5	100	6	11	61,11
5.01.01.2.01.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15	-	5	5	100	6	10	66,67
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	-	4	4	100	4	8	66,67
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi i(%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	222	-	74	74	100	74	148	66,67
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	-	2	2	100	2	4	66,67
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	-	5	5	100	5	10	66,67
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Pegawai		-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	336	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	50	10	0	10	10	11	22,00
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	336	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	-	10	7	70	10	17	56,67
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.01.2..06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	-	10	10	100	10	20	66,67
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	39	-	13	13	100	13	26	66,67
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	33,33
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30	-	10	10	100	10	20	66,67
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165	-	55	55	100	55	110	66,67
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	45.000	-	1500	1126	75,07	1500	30.00	66,67
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan		-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2023	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	-	4	3	75	1	5	83,33
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	132	-	44	44	100	44	88	66,67
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	-	3	2	66,67	3	5	55,56
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud	Aplikasi	2	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan		-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	-	12	12	100	12	24	66,67
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	-	2	1	50	2	4	66,67

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/ Keg RENJA PDThn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PDs/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	153	-	51	20	39,22	51	102	66,67
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	-	2	1	50	2	4	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	612	-	204	45	22,06	204	249	40,69
5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan aset tak berwujud	Aplikasi	3	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6	-	2	1	50	2	3	50
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	21	-	7	6	85,71	7	13	61,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2024		
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase kajian atau penelitian yang digunakan utk rekomendasi kebijakan pemda (inovasi daerah)										
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Kelitbangan di Bidang Penyelenggara Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										
5 05 02 2.01 01	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	6	-	2	2	100	2	4	66,67	
5 05 02 2.01 02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	6	-	2	2	100	2	4	66,67	
5 05 02 2.01 03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelengkapan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelengkapan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	-	-	-	-	1	1	33,33	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3	-	-	--	-	1	1	33,33	
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	-	-	-	-	1	1	33,33	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Kelitbangan di Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial	Dokumen	6	-	-	-	-	2	2	33,33	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Program Dan Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan PD Renja PDThn 2024	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=11/5*100
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	-	2	2	100	2	4	66,67
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	3	-	1	1	100	1	2	66,67
5 05 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	6	-	2	2	100	2	4	66,67
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.03 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	33,33

5 05 02 2.04	Pengembangan Teknologi	Inovasi dan	Dokumen Kelitbangan di Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknolog	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	-	-	-	1	1	33,33	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	6	-	2	2	100	4	66,67	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	-	1	1	100	2	66,67	

Samarinda, 5 Agustus 2024
Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 dan tahun 2023 :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2022, total belanja sebesar Rp. 31.904.261.684,- yang digunakan untuk anggaran 4 program, 17 kegiatan dan 55 Sub kegiatan
2. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2023, total belanja sebesar Rp. 38.528.671.921,- dengan realisasi anggaran 32,365.877.419,- atau 84 % yang digunakan untuk anggaran 4 program, 17 kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Kota Samarinda

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

No.	Sasaran	SPM	Indikator Sasaran	Target Renstra OPD						Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	20,48	21,00	21,20	21,50	22,00	22,50	
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik		Indeks Inovasi Daerah	52	55	61	64	67	71	
4	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPERIDA		IKM	78	80	85	86	87	90	
No.	Sasaran	SPM	Indikator Sasaran	Capaian Renstra OPD						Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	20,48	20,67	21,28				
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik		Indeks Inovasi Daerah	52,71	45,44	59,20				
4	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPERIDA		IKM	78	84,58	82,70				

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPERIDA merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda. BAPPERIDA Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penunjang di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitiandan Pengembangan.

Adapun Fungsi BAPPERIDA Kota Samarinda di dalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan;

- e. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
- g. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11), yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Peraturan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- a. Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

2.2.2 Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2021-2026, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Dalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BAPPERIDA Kota Samarinda dalam pencapaian Renstra terlihat indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian program prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD, indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Samarinda Dalam Angka, Profil Daerah, Delapan Kelompok Data serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja OPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.

2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup prasarana wilayah terhadap dokumen perencanaan OPD; OPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan OPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan OPD lingkup Pemerintahan dan sosial budaya terhadap dokumen perencanaan OPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BAPPERIDA dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BAPPERIDA Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu strategis dalam Perubahan Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2021-2026 antara lain : Sinkronisasi antar dokumen perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintahan. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan Survei Pendahuluan dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

1) Permasalahan pelaksanaan AKIP Kota Samarinda tahun 2023, meliputi :

a. Perencanaan Kinerja

- ❖ Rumusan sasaran dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum seluruhnya berorientasi hasil, belum sepenuhnya dilengkapi indikator outcome yang terukur dan target kinerja jangka menengah belum ditetapkan dengan baik.
- ❖ Ketidak selarasan penganggaran yang tertuang dalam RKA-PD dengan perencanaan yang dituangkan dalam Renstra PD.
- ❖ Dokumen Penetapan Kinerja (PK) belum dimonitor secara berkala dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam berbagai pengarah, monitoring kinerja maupun pengambilan kebijakan.
- ❖ Dokumen RPJMD/Renstra PD belum sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJMN/dokumen RPJMD, belum menyajikan IKU dengan baik dan belum direviu secara berkala.
- ❖ Dokumen RKT/Renja PD belum seluruhnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun anggaran (target kinerja RKT vs target kinerja RKA).

b. Pengukuran Kinerja

- ❖ Hasil pengukuran belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.
- ❖ Rumusan indikator kinerja (terutama di OPD) belum cukup untuk mengukur kinerja.
- ❖ Sistem/mechanisme pengumpulan data kinerja belum memadai mengenai capaian indikator kinerja.

- ❖ Pengukuran IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta untuk penilaian kinerja
- ❖ Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

Peningkatan Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai acuan proses perencanaan berikutnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi dan antar kabupaten/kota dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri. Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang handal dapat membantu menghimpun informasi capaian kinerja secara lengkap dan cepat.

Informasi capaian kinerja yang lengkap dapat menjadi masukan bagi proses pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, serta bagi umpan balik terhadap tahap perencanaan selanjutnya. Sistem Monev yang handal diharapkan akan juga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan untuk fase selanjutnya.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renja-PD dan RKA-PD) harus terus dipantau pelaksanaan selama Tahun Anggaran berjalan. Salah satu penyebab belum maksimalnya hasil yang diperoleh sebagaimana diuraikan di atas, adalah belum optimalnya pembinaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas aparatur pelaksanaannya. Sesuai dengan tingkatan pemerintahan, kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi telah diamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengendalian dan evaluasi yang harus dilaksanakan meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan evaluasi hasil Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah direncanakan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima (Masyarakat/OPD)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai koordinator perencanaan pembangunan mempunyai jenis pelayanan tersendiri untuk mengakomodir perencanaan perangkat daerah. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda berusaha sebaik mungkin untuk dapat memaksimalkan pelayanan perangkat daerah yang ingin berkoordinasi dalam hal perencanaan pembangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RancanganRKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RancanganRKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPDP Tahun 2025
Kota Samarinda

NO	Rancangan RKPDP				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Cata tan Pent ing (12)
	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Prog/Keg/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	24.235.537.077	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	24.962.603.189
A	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	82 Nilai	418.592.368	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	82 Nilai	430.353.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	51.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	53.045.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.304.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahannya RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahannya RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahannya RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahannya RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahannya RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahannya RKA-SKPD	1 Dokumen	5.304.500
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.304.500

5	Koordinasi Penyusunan DPA-SKP dan Perubahan Laporan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Koordinasi Penyusunan DPA-SKP dan Perubahan Laporan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.304.500	
6	Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	3 Laporan	51.500.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	3 Laporan	53.045.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	51.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	53.045.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	16.563.135.326	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	16.901.448.134	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	15.222.585.325	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	15.520.681.633	
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.289.050.001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.327.721.501	
13	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tahunan SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	51.500.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tahunan SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	53.045.000	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	259.254.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	298.961.620	
14	Pengadaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112 Paket	84.254.000	Pengadaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112 Paket	86.781.620	

15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	106.090.000	
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	51.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	53.045.000	
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	106.090.000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.642.842.724	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4 Laporan	3.207.935.231	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	180.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	185.657.500	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	900.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1.273.080.000	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.360.726	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.711.548	
21	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	95.231.998	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	98.088.958	
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.750.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	26.522.500	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	77.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	10 Laporan	79.567.500	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.236.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.273.080.000	

25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	191.227.225	
E	Pengadaan Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	1.443.100.000	Pengadaan Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	816.893.000	
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	1 Unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	1 Unit	449.397.240	
27	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	669.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	689.585.000	
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21.218.000	
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	103.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	106.090.000	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	1.485.570.000	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	1.020.354.326	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	618.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	636.540.000	
31	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	867.570.000	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	383.814.326	

G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.021.542.659	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	1.707.364.387	
32	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	611.956.409	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	321.315.101	
33	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	85.000.000	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	26.225.448	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204 Unit	206.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204 Unit	212.180.000	
35	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	150.000.000	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	690.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	710.803.000	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	278.486.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	286.840.838	

II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	10.396.549.980	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	4 Dokumen	10.745.906.867
H	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	3.946.010.700	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Samarinda	4 Dokumen	4.064.391.023
38	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RancanganRPJMD/RKP D (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	878.485.840	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	2 Dokumen	904.840.416
39	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	519.873.445	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Samarinda	2 Dokumen	535.469.648
40	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	97.003.134	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Samarinda	1 Berita Acara	99.913.228
41	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	432.931.403	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Samarinda	2 Berita Acara	445.919.345
42	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	593.154.289	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	2 Berita Acara	610.948.918
43	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Ter-verifikasi oleh Kecamatan	220.869.029	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Samarinda	20000 Usulan	227.495.100
44	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	1.203.693.560	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	2 Dokumen	1.239.804.368

I	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.446.639.635	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.490.038.824	
45	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	678.630.435	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	698.989.348	
46	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80 Orang	768.009.200	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80 Orang	791.049.476	
J	Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.003.899.645	Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.191.477.020	
47	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4.230.568.434	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4.394.945.872	
48	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	57.496.918	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	59.221.826	
49	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	715.834.293	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	737.309.322	

III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 %	5.178.788.500	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarinda	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 %	5.334.152.155	
K	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2.657.863.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2.737.599.405	
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	360.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	371.315.000	
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	59.225.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	61.001.750	
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	59.225.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	61.001.750	

53	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	824.000.000	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	848.720.000
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	721.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	742.630.000
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	59.225.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	61.001.750
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	59.225.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	61.001.750
57	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	515.463.500	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	530.927.405

L	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.238.575.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.275.732.250
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	77.250.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	79.567.500
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	26.265.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	27.052.950
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	618.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	636.540.000
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	17.510.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	18.035.300
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	257.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	265.225.000

63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	206.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	212.180.000	
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	14.420.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	14.852.600	
65	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	21.630.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Laporan	22.278.900	
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	1.282.350.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	1.320.820.500	
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	154.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	159.135.000	
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	27.810.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Laporan	28.644.300	

68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	18.540.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	19.096.200	
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.081.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.113.945.000	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Samarinda	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	83,33%	2.211.590.868	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Samarinda	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	83,33 %	2.277.937.958	
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Samarinda			428.239.495	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Samarinda			441.086.680	
70	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	103.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	106.090.000	
71	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	103.451.758	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	106.555.311	

72	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	103.337.737		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	106.437.869	
73	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	15.450.000		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	15.913.500	
74	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	103.000.000		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Samarinda	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	106.090.000	
O	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Dokumen	625.303.524		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Dokumen	644.062.629	
75	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	106.945.415		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	110.153.777	
76	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	103.000.000		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	106.090.000	
77	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	103.000.000		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	106.090.000	
78	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	103.000.000		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	106.090.000	
79	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	103.000.000		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	106.090.000	

80	Penelitian Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	106.358.109	Penelitian Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	106.358.109	Penelitian Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	109.548.852
P	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8 Dokumen	838.265.500	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8 Dokumen	838.265.500	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8 Dokumen	863.413.465
81	Penelitian Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	106.090.000
82	Penelitian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	107.635.000	Penelitian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	107.635.000	Penelitian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	110.864.050
83	Penelitian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	106.090.000
84	Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	106.090.000
85	Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	106.090.000
86	Penelitian Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	106.090.000
87	Penelitian Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	103.000.000	Penelitian Pengembangan Perhubungan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	106.090.000
88	Penelitian Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	112.630.500	Penelitian Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	112.630.500	Penelitian Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	116.009.415

			Informatika						Informatika			
Q	Pengembangan Inovasi Teknologi dan Teknologi	Kota Samarinda	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	4	319.782.349	Pengembangan Inovasi Teknologi dan Teknologi	Kota Samarinda	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	4 Dokumen	329.375.820		
89	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	98.345.430	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	101.295.793		
90	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	112.164.219	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	115.529.146		
91	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	109.272.700	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	112.550.881		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAPPERIDA Kota Samarinda mempunyai tugas untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD baik melalui penelitian lapangan maupun pengamatan dan penyerapan aspirasi pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Menghadapi era globalisasi saat ini gelombang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin “pasang”. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) melakukan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi akan mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks di mana akan ada pilihan antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintah (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang akan memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut akan mencerminkan betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional.

Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme Kementerian/Lembaga (K/L) yang dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada dasarnya memperhatikan :

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dan Rancangan RPJMN Kedalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan rencana awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran oprasional rencana awal RPJMN yang memuat prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (*outcome*) program K/L dengan program prioritas presiden;
- e. Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (*outcome*) program K/L dan;
- f. Sumber daya yang diperlukan.

Dalam perencanaan pembangunan yang sinergi maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra BAPEDDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan ekseabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- b. *Mainstreaming* ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- c. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;
- d. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- e. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- f. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;

- g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- h. Pencapaian MDG's dan;
- i. Pencapaian MP3EI.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda selama lima tahun. Dalam Tabel 4.1

Adapun tujuan Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2022-2026 dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat”. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk :

- ✓ Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- ✓ Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional yaitu :

- ✓ Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri
- ✓ Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, Seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni dll. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Peran Koordinasi Perencanaan sangat diperlukan tidak

hanya sebagai penentu arah, namun juga kecepatan dan kualitas pembangunan. Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu). Memperhitungkan berbagai sumber pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis). Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk :

- ✓ Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD)
- ✓ Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD)
- ✓ Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).

Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang dikenal dengan money follow function, sebagai salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yakni anggaran hanya dialokasikan kepada kementerian/lembaga atau satuan kerja yang tugas fungsinya relevan dengan target kinerja yang akan dicapai secara nasional. Sementara pada konsep Money Follow Program sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program dan kegiatan

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat.

Melalui pendekatan Money Follow Program diharapkan :

- a. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat
- b. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur
- c. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan.

Konsep money follow program menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen perencanaan merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan di daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kota,

Dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perencanaan dan implementasinya. Konsistensi dan sinergitas inilah yang diharapkan dapat memberi nilai tambah positif bagi masyarakat sehingga kesejahteraan di Kota Samarinda dapat diwujudkan.

Disamping konsistensi dan sinergitas, dokumen perencanaan yang bermutu dihasilkan melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratik diartikan sebagai sebuah metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis

terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan partisipatif diartikan sebagai proses melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan dan adanya kesepakatan. Pendekatan politis diartikan sebagai proses penerjemahan program-program pembangunan yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam RPJMD.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* diartikan sebagai proses musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk itu salah satu tujuan Bappeda Kota Samarinda adalah meningkatkan mutu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.

Sebelum kita melangkah lebih jauh alangkah baiknya mengartikan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut sedangkan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Tujuan pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil dari rencana pembangunan daerah
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan di aspek pengendalian dan evaluasi :

- a. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja, indikasi :
 - SAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih beorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata
 - Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya
 - Kualitas SPIP masih rendah
- b. Rendahnya kemampuan pegawai dalam perencanaan, indikasi :
 - Belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev
- c. Rendahnya kualitas dan informasi, indikasi :
 - Data tidak ada, atau berbeda antar instansi, atau terlambat dalam beberapa tahun
- d. Rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPj kepala daerah, padahal rekomendasi tersebut bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan membutuhkan sebuah manajemen. Fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (mengorganisasikan), *actuating* (mengaktualisasikan), *controlling* (pengawasan).

Dengan demikian awal dari sebuah pelaksanaan program perlu sebuah perencanaan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diselaraskan Undang - Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Dokumen rencana pembangunan Nasional yang harus dibuat adalah sebagai berikut :

Dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sedang dokumen perencanaan yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah adalah:

- a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra)
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota, mencakup perencanaan pembangunan Daerah pada wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, pelayanan yang dimaksud adalah untuk OPD dalam hal BAPPERIDA Kota Samarinda sebagai koordinator perencanaan daerah.

Untuk mengukur sejauh mana capaian misi dan tujuan jangka menengah BAPPERIDA Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh BAPPERIDA Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun daerah. Sasaran dan indikator sasaran BAPPERIDA Kota Samarinda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2022-2026 dalam Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat” dapat dicapai dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:
 - Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja
- b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik
 - Indeks Inovasi Daerah
- c. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPERIDA
 - IKM

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Matrik Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,00	21,20	21,50	22,00	22,50
		2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	55	61	64	67	71
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPERIDA	IKM	80	85	86	87	90

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Sesuai dengan Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, yaitu : **“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya.
- Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
- Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
- Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
- Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

BAPPERIDA Kota Samarinda RPJMD Tahun 2021-2026 mendukung Misi ketiga yaitu Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban dirumuskan 10 (sepuluh) program unggulan, meliputi :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground

10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda mendukung agenda prioritas 10 yaitu Program smart city plus. Secara umum Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Rencana Kerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Program dan Kegiatan managerial (yang dikelola Sekretariat) terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan dalam Rencana Kerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2023 terdiri dari 3 Program, 10 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dalam Tabel 3.2, yaitu sebagai berikut :

TABEL 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda
Bapperida Kota Samarinda

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Samarinda	87	24.235.537.077			87	24.962.603.189
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Samarinda		175.100.000				180.353.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	6 Dokumen	51.500.000			6 Dokumen	53.045.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Jumlah Dokumen RASKSP dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	5.150.000			2 Dokumen	5.304.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	5.150.000			1 Dokumen	5.304.500
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	5.150.000			1 Dokumen	5.304.500
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	1 Dokumen	5.150.000			1 Dokumen	5.304.500

RANCANGAN AKHIR RENJA BAPPERIDA TAHUN 2025

DPA-SKP	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarida	1 Laporan	51.500.000				1 Laporan	53.045.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarida	1 Laporan	51.500.000				1 Laporan	53.045.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarida	4 Laporan	51.500.000				4 Laporan	53.045.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarida		16.563.135.326					17.060.029.386
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarida	74 Orang/Bulan	15.222.585.325				74 Orang/Bulan	15.679.262.885
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarida	2 Dokumen	1.289.050.001				2 Dokumen	1.327.721.501
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarida	3 Laporan	51.500.000				3 Laporan	53.045.000
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarida		341.754.000					352.006.620
11	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarida	112 Paket	84.254.000				112 Paket	86.781.620
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarida	10 Orang	103.000.000				10 Orang	106.090.000
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarida	112 Orang	51.500.000				112 Orang	53.045.000

14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	10 Orang	103.000.000			10 Orang	106.090.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Samarinda		3.114.500.224				3.207.935.231
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	180.250.000			10 Paket	185.657.500
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	13 Paket	1.236.000.000			13 Paket	1.273.080.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	78.360.726			1 Paket	80.711.548
18	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	95.231.998			1 Paket	98.088.958
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Dokumen	25.750.000			1 Dokumen	26.522.500
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	10 Laporan	77.250.000			10 Laporan	79.567.500
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	55 Laporan	1.236.000.000			55 Laporan	1.273.080.000
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	1500 Dokumen	185.657.500			1500 Dokumen	191.227.225
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Samarinda		1.538.408.000				1.584.560.240
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	436.308.000			1 Unit	449.397.240

24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarida	1 Unit	309.000.000			1 Unit	318.270.000
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarida	44 Unit	669.500.000			44 Unit	689.585.000
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarida	3 Unit	20.600.000			3 Unit	21.218.000
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarida	2 Unit	103.000.000			2 Unit	106.090.000
F	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Kota Samarida		990.635.268				1.020.354.326
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarida	12 Laporan	618.000.000			12 Laporan	636.540.000
29	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarida	2 Laporan	372.635.268			2 Laporan	383.814.326

G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarida		1.512.004.259				1.557.364.387
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarida	59 Unit	311.956.409			59 Unit	321.315.101
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Samarida	2 Unit	25.461.600			2 Unit	26.225.448
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarida	204 Unit	206.000.000			204 Unit	212.180.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarida	2 Unit	690.100.000			2 Unit	710.803.000
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarida	7 Unit	278.486.250			7 Unit	286.840.838
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Samarida		10.396.549.980				10.708.446.479
H	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Samarida		3.946.010.700				4.064.391.021
35	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Samarida	2 Dokumen	878.485.840			2 Dokumen	904.840.415

36	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Samarida	2 Dokumen	519.873.445				2 Dokumen	535.469.648
37	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Samarida	1 Berita Acara	97.003.134				1 Berita Acara	99.913.228
38	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Samarida	1 Berita Acara	432.931.403				2 Berita Acara	445.919.345
39	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Samarida	2 Berita Acara	593.154.289				2 Berita Acara	610.948.918
40	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Samarida	20000 Usulan	220.869.029				20000 Usulan	227.495.100
41	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Kota Samarida	3 Dokumen	1.203.693.560				3 Dokumen	1.239.804.367
I	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota Samarida		1.446.639.635					1.490.038.824
42	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Samarida	4 Masukan	678.630.435				4 Masukan	698.989.348
43	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Samarida	80 Orang	768.009.200				80 Orang	791.049.476

48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah	Kota Samarinda	20 Perangkat Daerah	59.225.000			20 Perangkat Daerah	61.001.750
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	1 Laporan	59.225.000			1 Laporan	61.001.750
50	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Samarinda	1 Laporan	824.000.000			1 Laporan	848.720.000
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	721.000.000			1 Dokumen	742.630.000
52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	9 Perangkat Daerah	59.225.000			9 Perangkat Daerah	61.001.750
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	9 Perangkat Daerah	59.225.000			9 Perangkat Daerah	61.001.750

54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Samarinda	1 Laporan	515.463.500			1 Laporan	530.927.405
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Kota Samarinda		1.238.575.000				1.275.732.250
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	77.250.000			1 Dokumen	79.567.500
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	4 Perangkat Daerah	26.265.000			4 Perangkat Daerah	27.052.950
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	1 Laporan	618.000.000			1 Laporan	636.540.000
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra Renja Bidang Perekonomian	Kota Samarinda	4 Perangkat Daerah	17.510.000			4 Perangkat Daerah	18.035.300
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarinda	1 Dokumen	257.500.000			1 Dokumen	265.225.000

60	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	Kota Samarida	1 Laporan	206.000.000			1 Laporan	212.180.000
61	Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang dapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Samarida	3 Perangkat Daerah	14.420.000			3 Perangkat Daerah	14.852.600
62	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Samarida	3 Perangkat Daerah	21.630.000			3 Perangkat Daerah	22.278.900
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Kota Samarida		1.282.350.000				1.320.820.500
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Samarida	1 Dokumen	154.500.000			1 Dokumen	159.135.000
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Samarida	4 Perangkat Daerah	27.810.000			4 Perangkat Daerah	28.644.300

65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	4 Perangkat Daerah	18.540.000			4 Perangkat Daerah	19.096.200
66	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Samarinda	1 Laporan	1.081.500.000			1 Laporan	1.113.945.000
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Kota Samarinda	63 %	2.211.590.868			63 %	2.277.938.594
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Kota Samarinda		428.239.495				441.086.680
67	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Samarinda	2 Laporan	103.000.000			2 Laporan	106.090.000
68	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Samarinda	2 Laporan	103.451.758			2 Laporan	106.555.311
69	Fasilitasi, Pelaksanaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,	Kota Samarinda	1 Laporan	103.337.737			1 Laporan	106.437.869

	dan Pembangunan	Dimanfaatkan							
78	Penelitian dan Pengembangan Usaha Koperasi, Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Samarida	1 Dokumen	103.000.000			1 Dokumen	106.090.000
79	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Samarida	2 Dokumen	107.635.000			2 Dokumen	110.864.050
80	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Samarida	1 Dokumen	103.000.000			1 Dokumen	106.090.000
81	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Samarida	1 Dokumen	103.000.000			1 Dokumen	106.090.000
82	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Samarida	1 Dokumen	103.000.000			1 Dokumen	106.090.000
83	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Samarida	1 Dokumen	103.000.000			1 Dokumen	106.090.000
84	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Samarida	1 Dokumen	103.000.000			1 Dokumen	106.090.000
85	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Samarida	1 Dokumen	112.630.500			1 Dokumen	116.009.415
Q	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dapat Diterapkan	Kota Samarida		319.782.349				329.375.819
86	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	Kota Samarida	1 Dokumen	98.345.430			1 Dokumen	101.295.793

87	Bidang Teknologi dan Inovasi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		2 Laporan	112.164.219			2 Laporan	115.529.146
88	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	109.272.700			1 Laporan	112.550.881

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana kegiatan dan pendanaan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda adalah " **TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**", maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BAPPERIDA Kota Samarinda tahun 2025 terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 11) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 12) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 13) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 14) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 15) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 16) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 17) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 18) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 19) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 20) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 21) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 22) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 23) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 24) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 25) Pengadaan Mebel

26) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

27) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

28) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

29) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

31) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

32) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

33) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

34) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

35) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

H. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

36) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

37) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

38) Pelaksanaan Konsultasi Publik

39) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

40) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

41) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

42) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

I. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

43) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

44) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

J. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

45) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

46) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

47) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

K. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

48) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

49) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

50) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

51) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

52) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

53) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- 54) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 55) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

L. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 56) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 57) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 58) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 59) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 60) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 61) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 62) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 63) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

M. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 64) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 65) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 66) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 67) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

N. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- 68) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 69) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- 70) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

O. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- 71) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 72) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

P. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 73) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 74) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 75) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- 76) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- 77) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Q. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

78) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

79) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

80) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Samarinda.

TAHUN 2025

TAHUN 2025

5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	25.750.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	26.522.500,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77.250.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	79.567.500,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1771 Laporan	55 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.236.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	1.273.000.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada											
5	01	01	2.07		Jumlah Dokumen	600 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	191.227.225,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.07		Laporan Rencana Kebutuhan	7 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.731.100.000,00		-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	1.754.893.000,00	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan											
5	01	01	2.07		Jumlah Unit Kendaraan	7 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas											
5	01	01	2.07		Jumlah Unit Kendaraan Dinas	6 Unit	1 Unit	5 Unit	2 Unit	288.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.07	0003	Pengadaan Mebel											
5	01	01	2.07		Jumlah Paket Mebel Yang	182 Unit	44 Unit	50 Unit	44 Unit	660.500.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	689.585.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin											
5	01	01	2.07		Jumlah Unit Peralatan dan	6 Unit	3 Unit	0 Unit	3 Unit	20.600.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	21.218.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana											
5	01	01	2.08		Jumlah Unit Sarana dan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	103.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.08		Laporan Penyediaan Jasa	26 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.485.570.000,00		-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	1.020.354.326,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber											
5	01	01	2.08		Jumlah Laporan Penyediaan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	618.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	636.540.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum											
5	01	01	2.09		Jumlah Laporan Penyediaan	18 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	987.570.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	983.814.326,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.09		Laporan Pemeliharaan Barang	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.021.542.659,00		-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	1.707.364.387,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya											
5	01	01	2.09		Jumlah Kendaraan Perorangan	255 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	611.956.409,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	321.313.101,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya											
5	01	01	2.09		Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	26.725.448,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											
5	01	01	2.09		Jumlah Peralatan dan Mesin	1021 Unit	204 Unit	205 Unit	205 Unit	206.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
5	01	01	2.09		Jumlah Aset Tak Berwujud yang	5 Unit	6 Unit	1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung											
5	01	01	2.09		Jumlah Gedung Kantor dan	10 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	690.100.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	710.803.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan											
5	01	01	2.09		Jumlah Sarana dan Prasarana	35 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	278.486.250,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	286.840.838,00	BADAN PERENCANAAN
2	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, Presentase Capaian Kinerja	95 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen	13.341.225.243,00		-	90 Persentase		10.745.906.867,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.261.886.950,00		-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	4.064.391.023,00	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah,											
5	01	02	2.01		Jumlah Dokumen Rancangan	11 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.450.433.600,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	5. Penguatan Pelayanan	Perangkat Daerah di	904.840.416,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen											
5	01	02	2.01		Jumlah Telaahan Dokumen	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	698.496.000,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	535.469.648,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
5	01	02	2.01		Jumlah Berita Acara Konsultasi	8 Berita Acara	3 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	446.649.900,00	Kota Samarinda, PONDAPATAN ASU	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	99.913.228,00	BADAN PERENCANAAN

5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77.250.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	636.540.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	265.225.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	9 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	75.909.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	22.278.900,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	58.699.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	14.852.600,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	257.500.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen Koordinasi	32 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1.173.792.000,00	-	-	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	1.320.820.500,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	864.384.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	159.135.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	12 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	32.089.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	28.644.300,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	72.819.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	19.096.200,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	154.500.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	1.113.545.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Presentase Pemanfaatan Hasil	83,33 Persen				2.875.751.100,00						1.310.484.046,00	
4	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN	Jumlah Dokumen Kelitbangan	13 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	371.953.600,00						83,33 Persen	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	228.558.811,00	
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	127.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil	7 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	124.438.600,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.555.311,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan	Jumlah Data Kelitbangan dan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.513.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	15.913.500,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Dokumen Kelitbangan	17 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	560.000.000,00						212.180.000,00	
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Dokumen Kelitbangan	23 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	911.579.500,00						540.369.415,00	
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	178.832.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Energi	Jumlah Dokumen Hasil	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114.217.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	130.900.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	112.650.500,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	116.009.415,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	992.218.000,00						329.375.820,00	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan	Jumlah Dokumen Hasil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	101.295.793,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Jumlah Laporan Hasil	7 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	196.000.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	115.529.146,00	BADAN PERENCANAAN
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	Jumlah Laporan Hasil	6 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	421.218.000,00	Kota Samarinda,	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	Perangkat Daerah di	112.550.881,00	BADAN PERENCANAAN
A	H										49.584.414.556,00						42.445.939.266,00	

BAB V

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Rencana Kerja adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis BAPPERIDA Kota Samarinda diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasi.

Rancangan Akhir RENJA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPERIDA. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPERIDA Kota Samarinda.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen

dan seluruh staf BAPPERIDA Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Samarinda, 5 Agustus 2024

Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681209 198803 1 004